

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN MELALUI KERTU PENJAMIN SOSIAL DAN KARTU  
INDONESIA PINTAR PADA MASYARAKAT  
(Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)**

**Muhammad Sulhan, Totok Sasongko**

Program Pasca Sarjana, Universitas Tribuwana Tunggaladewi

Email : sulhan208@yahoo.co.id

*Abstract : The results from the study showed that the poverty reduction policies which in the determination of the distribution of social insurance corporation cards and Indonesia Smart Card conduct preliminary fielded clerk who will then conduct a survey or checking the area or areas deemed eligible to receive assistance from the government that came with the role of the community itself , Based grouping of people is done by officers to facilitate the distribution of aid means social insurance corporation cards and Indonesia Smart Card in the city of Malang, especially in Sub Kuaman which has a population of 560 inhabitants of poor people among them who are entitled to a card guarantor of social only 30% while the card Indonesia smart as much as 5%.*

*Keywords: Implementation of Policy, Poverty, social insurance corporation cards (KPS) and Indonesia Smart Card (KIP)*

Abstrak: hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan angka kemiskinan melalui pendistribusian KPS dan KIP dilakukan melalui studi pendahuluan terlebih dahulu, kemudian survey serta pengecekan area yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan pengelompokan masyarakat yang dilakukan oleh petugas terkait untuk memfasilitasi pendistribusian KPS dan KIP khusus nya masyarakat Kecamatan Kauman yang populasinya mencapai 560 penduduk di temukan data bahwa masyarakat miskin yang berhak menerima KPS sebanyak 30% sedangkan masyarakat miskin yang berhak menerima KIP sebanyak 5%.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kemiskinan, KPS dan KIP

## **PENDAHULUAN**

Dikelurahan Kauman Malang Jawa Timur yang terdiri dari 10 RW di wilayah tersebut, warga miskin yang terdaftar mendapat KPS tidak terdata secara menyeluruh. Tercatat di wilayah RW 09 hanya 6 KK saja sedangkan di beberapa RW lain seperti RW 10 tidak ada satupun warga yang terdaftar mendapat KPS. Berbeda dengan warga RW 01 yang hampir 30% warganya mendapat KPS. Sedangkan untuk Kartu Indonesia Pintar juga tidak terealisasi dengan baik, dari 2734 warga Kelurahan kauman hanya sekitar 5% KK dengan anak usia sekolah yang memperoleh dana KIP dan itupun melalui sekolah masing – masing yang sudah mengetahui kondisi seluarga siswanya.

### **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada masyarakat Kelurahan Kauman
2. Mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada masyarakat Kelurahan Kauman

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah**

Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses kebijakan implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Ahmad Yani (2002).

Implementasi Program KPS dan KIP ini dalam merupakan program pemerintah pusat yang diaplikasikan ke daerah terutama wilayah kantong – kantong masyarakat miskin. Di wilayah Kauman setiap RW memiliki populasi sebanyak 10 RW.

### **Teori Kemiskinan dalam Masyarakat Bidang Sosial Ekonomi dan Pendidikan**

Selama ini masyarakat mengandalkan program KPS ini sebagai penunjang tambahan keterbatasan dibidang ekonomi, Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia (2003 : 43) menegaskan bahwa garis kemiskinan adalah nilai ambang batas (rupiah) untuk menentukan jumlah penduduk miskin yang dihitung berdasarkan komponen kecukupan makanan yaitu bundel konsumsi yang setara dengan energi sebanyak 2.100 kalori per orang per hari, dan kecukupan non makanan yang dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena buatan manusia maupun alamiah, fenomena itu bias berupa bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena yang lain (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Malang Jawa Timur. Yang beralamat di Jl. Kauman 1 Malang serta wilayah penduduk di sekitar Kelurahan Kauman waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2016.

Sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari pengguna program KPS dan KIP di wilayah Kelurahan Kauman berjumlah 50 orang sebagai sampel.

Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenisnya selanjutnya di interpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah daerah wilayah Kota Malang khususnya wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan wilayah yang terdiri dari 10 RW yang setiap RW terdiri dari 10 RT dengan populasi warga sebesar 2734 jiwa dengan warga miskin tercatat sebanyak 560 jiwa namun tidak seluruhnya mendapat dan tercatat sebagai pemegang KPS dan KIP. Karenanya para aparatur kelurahan Kauman diharapkan dapat turun meninjau ulang

kelayakan para penerima KPS dan KIP demi kesejahteraan warga di bidang ekonomi dan pendidikan. Selama ini realisasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Kauman berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak RW bahkan pihak kelurahan juga mengirim petugas untuk survey silang apakah warga yang terdaftar KPS dan KIP layak mendapatkannya. Dalam beberapa kesempatan setelah adanya survey pihak kelurahan namun tidak terealisasi ke bawah, hambatan ini biasanya muncul di wilayah pemerintahan terkecil setingkat RT.

### **Dampak Implementasi Kebijakan Program KIP dan KPS**

Dampak yang di rasakan masyarakat Kelurahan Kauman dalam program KIP adalah menghilangkan hambatan siswa secara ekonomi untuk berpartisipasi disekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah, mencegah anak/siswa yang putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik anak yang putus sekolah agar kembali kesekolah, membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran dan mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang berhasil peneliti lakukan sosialisasi dilakukan oleh sekolah yang mana siswa kurang mampu yang mendapatkan melalui rapat sosialisasi program kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui KIP dengan kesetaraan usia 6-21 tahun, sedangkan untuk prosedur verifikasi data dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan mengajukan nomor KPS dan KIP untuk mendapatkan dana. Dengan mengajukan ke perangkat desa untuk KPS dan KIP langsung ke sekolah bersangkutan. Dalam pembagian kartu dilakukan apa bila syarat yang telah ditetapkan sudah memenuhi dan sudah terseleksi kartu KIP dan KPS tersebut dibagikan secara berkelanjutan. Dalam pencairan dana bagi yang punya kartu KIP dan KPS membuat rekening yang kemudian diberitahukan bahwa dana bisa diambil.

Beberapa informan yang sependapat “Sangat membantu dari segi ekonomi untuk Anak/Siswa dari keluarga kurang mampu sehingga anak mereka dapat melanjutkan sekolah dengan pelayanan pendidikan yang dirasa tidak dibeda-bedakan dalam hal siswa mampu menengah atas dan yang tadinya siswa putus sekolah bisa melanjutkan sekolah kembali dengan bantuan KIP tersebut. Selain itu dana pada program KIP dibelanjakan untuk kebutuhan atau perlengkapan sekolah seperti pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian seragam sekolah (Tas, sepatu, dll), biaya transportasi kesekolah, uang saku siswa dan iuran disekolah, biaya kursus atau les dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan perlengkapan dan kebutuhan sekolah”

Dampak yang di rasakan masyarakat Kelurahan Kauman dalam program KPS adalah dengan memiliki KPS, rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial, seperti : Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Sebagai penanda Rumah Tangga miskin, Kartu Penjamin sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari program subsidi beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan program RASKIN. Menurut beberapa informan dampak yang dirasakan sangat membantu perekonomian dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang ada di Kelurahan Kauman Kota Malang. “Dengan adanya bantuan bersubsidi beban masyarakat menjadi ringan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kauman**

Dalam Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, diperlukan faktor pendukung untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Faktor pendukung mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan/implementasi program di lapangan. Oleh karena itu semua aspek harus dipertimbangkan secara matang-matang serta harus bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Sehingga dalam pembuatan kebijakan aspirasi masyarakat akan ditampung dan dijadikan sebuah program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada bulan april 2016 dengan Bapak Muamar Gadapi di Kelurahan Kauman Kota Malang mengatakan bahwa warga Kelurahan Kauman masih banyak yang belum mendapatkan KIP dan KPS dari pemerintah dikarenakan adanya beberapa faktor seperti tidak bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan serta banyak warga yang tidak tahu tentang bantuan dari pemerintah mengenai KIP dan KPS, sehingga banyak warga disini belum memiliki kartu tersebut.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengelompokan masyarakat ini dilakukan oleh petugas untuk memudahkan dalam pembagian bantuan yang dimaksud kartu penjamin sosial dan kartu indonesia pintar di wilayah Kota Malang khususnya di Kelurahan Kuaman yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 560 jiwa warga miskin diantaranya yang berhak mendapatkan kartu penjamin sosial hanya 30% sedangkan kartu indonesia pintar sebanyak 5%.

Sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik dalam Peta Kemiskinan Indonesia (2003 : 43) *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta

Heru Nugroho, Riant, 2002, *Analisis kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Healey, Joseph F, 2002. *Statistics. 6th ed.* Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.

Juknis Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015. Home >> KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) >> Tentang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Syarat serta Ketentuannya. <http://blsm.posindonesia.co.id> dan <http://www.tnp2k.go.id>.

Muhadjir, Darwin. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.

Nasir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Kuncoroningrat, 2010. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

Suyanto, Bagong. 2003, *Program Kegiatan Penanggulangan Kota Surabaya Th.2003-2005, Komite Penanggulangan Kemiskinan*.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan *Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif*.

Artikel Pengertian KPS dan KIP: <http://www.dadangjsn.com/2015/07/pengertian-tujuan-prinsip-pelaksanaan.html>. Diunduh pada 11 Januari 2016